



Pemerintah Kabupaten  
Lombok Tengah

# 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

RENCANA KERJA  
(RENJA TAHUN 2025)



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Raden Puguh Puyung Praya

<https://lomboktengahkab.go.id>

+6281907601122

[perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com](mailto:perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diantaranya mengacu pada undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang isinya merupakan penjabaran rinci tentang Program Kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran serta sumbernya guna mencapai masing – masing target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Dengan telah dikeluarkannya dokumen Renja ini, maka diminta kepada semua pihak terutama masing–masing unit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2024 sehingga kinerjanya dapat lebih terarah dan terukur.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan tetap membuka diri atas saran maupun masukan untuk penyempurnaannya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberi manfaat lebih bagi yang membutuhkannya.

Praya, Juli 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.**

NIP. 196712311992031117

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.1	
1.2.2	
1.3.3	
1.4.3	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU ( TAHUN ANGGARAN 2023 ).....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.	21
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.	31
2.4	38
2.5	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH .....	53
3.1	60
3.1.1	60
3.1.2	64
3.2	68
3.2.1	68
3.2.2	69
3.3	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	65
BAB V PENUTUP .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PUPR	9
---	---



Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah - Tahun 2023	22
Tabel 2. 3 Realisasi Kinerja Persentase Jalan Mantap dengan Target Tahunan	22
Tabel 2. 4 Realisasi Kinerja Persentase sarana dan prasarana publik dan	25
Tabel 2. 5 Realisasi Kinerja Indeks Kinerja Irigasi Tahun 2023	26
Tabel 2. 6 Realisasi Kinerja Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses	28
Tabel 2. 7 Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan SPALDS dan	29
Tabel 2. 8 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2025 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	34
Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	50
Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	55
Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB.	57
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	60
Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan tahun 2025	61
Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pagu Sesuai Kebutuhan	66



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja (RENJA) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 ( dua ) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas daerah dan nasional, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan. Selain dengan melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan prasarana secara terus menerus juga diperlukan. Upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana yang terus



bertambah, karena tidak hanya prasarana yang memerlukan pemeliharaan makin membesar, tetapi juga biaya untuk material dan tenaga kerja juga meningkat. Upaya untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan berkurangnya kemampuan daerah tidak akan memperburuk kondisi prasarana. Salah satu cara efisien dalam pembangunan prasarana adalah melalui pemeliharaan yang baik. Umur pelayanan prasarana tidak hanya bergantung pada kualitas konstruksi prasarana yang telah dibangun, tetapi bergantung juga pada cara pemeliharaan. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Kerja (Renja) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan prasarana dengan pendanaan yang terbatas dan memperhatikan skala prioritas karena prasarana dengan kondisi mantap akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, terukur dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas sosial politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;



## 8. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2026.

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yakni untuk Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan menjadi prioritas penanganan dalam waktu satu tahun anggaran guna mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan sebagai wujud implementasi nyata atau penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Disamping itu nantinya didalam menyusun program dan kegiatan maupuun hingga pada tahapan penyusunan sub-kegiatan dapat lebih terarah dan terukur yang pada akhirnya dapat mencapai sasaran pokok sesuai dengan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

#### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025



## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka perwujudan pencapaian target pada program kegiatan.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU ( TAHUN ANGGARAN 2023 )**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.**

Pada Renstra (Rencana Strategis) Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, dimana untuk tahun 2021 merupakan tahun kondisi awal didalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya dalam bidang penyediaan layanan infrastruktur publik.

Berikut merupakan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas PUPR yang tertuang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1) dengan 4 sasaran strategis dan 10 kegiatan utama, anantara lain :

- a. Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan rincian kegiatan



- :
- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani, dengan rincian kegiatan :
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.
- c. Tersedianya gedung pelayanan publik dan Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang, dengan rincian kegiatan :
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;
  - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatnya distribusi air minum, dengan rincian kegiatan :
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel terlampir. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

## **URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran 19.474.855.597 dan realisasi sebesar 184.728.35.547 atau sebesar 94,85%, Dengan target indikator kinerja nilai sakip SKPD “BB”. Target nilai sakip BB tidak tercapai, untuk mencapai target diperlukan adanya kolaborasi dan koordinasi antar bidang di Dinas PUPR dalam merealisasikan target tersebut. Untuk meningkatkan nilai SAKIP menjadi BB dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif seluruh bidang. Hal ini dimaksudkan agar hasil penilaian dan evaluasi bisa lebih baik lagi.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tiga



kegiatan:

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar 194.295 620 dengan realisasi anggaran sebesar 191.427 407 atau sebesar 98.52%. Dengan target kinerja persentase layanan administrasi SKPD 100%, dan terealisasi sebesar 100%.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar 16.559.666.628 dengan realisasi sebesar 16.318.572.221 atau sebesar 98.54%. Dengan target kinerja persentase tersusunnya laporan keuangan SKPD 100%, dan terealisasi sebesar 100%.
- c. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar 48.077.520 dengan realisasi sebesar 48.050.800 atau sebesar 99.94%. Dengan target kinerja persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% dan terealisasi sebesar 100%.
- d. Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar 1.429.520.640 dengan realisasi sebesar 1.216.513.036 atau sebesar 85.09%. Dengan target kinerja Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD 100% dan terealisasi 100%.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar 876.046.420 dengan realisasi sebesar 797.559.615 atau sebesar 91,04%. Dengan target kinerja Perentase Terpeliharannya Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat (%) 100% dan terealisasi 100%.

## 2. Program : Pengelolaan SDA

Program Pengelolaan SDA memiliki anggaran 5.274.213.415 dan realisasi sebesar 5.226.492.320 atau sebesar 99.09 %, Dengan target indikator kinerja Prosentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi 81,81%, dan teralisasi sebesar 81,81% .

Program pengelolaan SDA memiliki 1 (satu) kegiatan yakni:

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar 5.274.213.415 dan terealisasi sebesar 5.226.492.320 atau sebesar 99.09%. Dengan indicator kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi.
- ## 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan nilai anggaran sebesar 48.018.019.240 dan terealisasi sebesar 47.610.947.040 atau sebesar 99.15 Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman 81.92% (%) dan terealisasi 83.67%. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki satu kegiatan yakni:
- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan nilai anggaran sebesar 48.018.019.240 dan terealisasi



sebesar 48.018.019.240 atau sebesar 99.15%. Indikator kinerja Jumlah Masyarakat Terlayani dan Mengonsumsi Air bersih 2254 KK dan terealisasi sebesar 2430 KK.

4. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan nilai anggaran sebesar 50.928.774.010 dan teralisasi sebesar 48.053.837.039 atau sebesar 94.35%. Dengan Indikator kinerja Presentase jalan kondisi mantap 79.88% dan teralisasi sebesar 72.38%. Target kinerja ini tidak tercapai disebabkan adanya perubahan alokasi dan DAU untuk peningkatan jalan. Program Penyelenggaraan Jalan memiliki 1 (satu) kegiatan yakni:
  - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota dengan nilai anggaran sebesar, 50.928.774.010 dan teralisasi sebesar 48.053.837.039 atau sebesar 94.35%. Dengan Indikator kinerja Presentase jalan kondisi mantap 79.88% dan teralisasi sebesar. Dengan indikator kinerja Panjang jalan mantap Kabupaten 647,01 Km dan teralisasi sebesar 586,26 Km. target kinerja ini tidak tercapai karena Pendanaan untuk pekerjaan jalan terutama peningkatan kondisi dan kapasitas jalan selama ini hanya bergantung pada DAK (Dana Alokasi Khusus) yang juga memiliki persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh beberapa ruas jalan. Dengan ditetapkannya pengusulan DAK dengan tematik DTW misalnya, menjadikan terbatasnya ruas jalan yang bisa diusulkan.
5. Program pengelolaan dan pengembangan air limbah, memiliki anggaran sebesar 15.025.348.550 dengan nilai realisasi sebesar 15.013.476.200 atau sebesar 99.92%. Program pengelolaan dan pengembangan air limbah memiliki target kinerja Persentase Akses Sanitasi Layak Dan Aman 100% dan tercapai sebesar 100%. Program pengelolaan dan pengembangan air limbah, memiliki 1(satu) kegiatan dan 1 subkegiatan yakni:
  - a. Pembangunan/pengembangan system air limbah domestic dalam daerah kabupaten/kota dengan nilai anggaran 15.025.348.550 dan terealisasi sebesar 15.013.476.200 Pembangunan/pengembangan system air limbah domestic memiliki target kinerja Jumlah Pengelolaan Air Limbah Domistik terbangun sebanyak 2 unit dan terbangun sebanyak 2 unit.
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki anggaran sebesar 416.663.440 dengan realisasi 416.387.001 atau sebesar 99.93%. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki target kinerja Jumlah Regulasi Tata Ruang yang Diterbitkan sebanyak 2 (dua) regulasi dan terealisasi sebanyak 2 (dua) regulasi. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki 1 (satu) kegiatan yakni:
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar 82.411.480 dan teralisasi sebesar 82.398.145 atau sebesar 99.98%. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota memiliki target kinerja Jumlah



- Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 (tiga) kegiatan dan teralisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan.
- b. Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran 124.766.480 dengan nilai realisasi sebanyak 124.665.976 atau sebesar 99.91%. Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang 500 kegiatan dan tercapai sebesar 687 kegiatan.
  - c. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar 209.485.480 dengan nilai realisasi sebesar 209.322.880 atau sebesar 99.92%. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota memiliki target kiner Jumlah perda dan perbup tata ruang sebanyak 2 perda dan perbup, dan terealisasi 1 perda, target kinerja ini belum tercapai di tahun 2023 karena masih dalam proses konsolidasi dan asistensi dengan pihak provinsi dan kementerian ATR.
7. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki anggaran senilai 8.795.267.260. dan terealisasi sebesar 8.572.780.141 atau sebesar 97.47%. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki target kinerja Gedung Pemerintah Terbangun sebanyak 3 unit dan terbangun sebanyak 4 unit. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki satu kegiatan yakni:
- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memiliki anggaran senilai 8.795.267.260. dan terealisasi sebesar 8.572.780.141 atau sebesar 97.47%. Dengan target kinerja Pembangunan Mall Pelayanan Publik 3 unit dan terealisasi 4 unit.
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya memiliki anggaran senilai 1.404.735.000. dan terealisasi sebesar 1.402.444.000 atau sebesar 99.83%. Dengan target kinerja Luasan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 15.000M2. dan terelisasi sebesar 5600 M2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya memiliki satu kegiatan yakni
- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar 1.404.735.000. dan terealisasi sebesar 1.402.444.000 atau sebesar 99.83%. Dengan target kinerja Luasan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 15.000M2. dan terelisasi sebesar 5600 M2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang tentunya dapat mempengaruhi pencapaian maupun upaya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

- b. Sumber daya manusia berupa tenaga Teknis yang ada pada Dinas PUPR



Kabupaten Lombok Tengah masih minim, secara rasio komposisi tenaga teknis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lombok Tengah yakni 30:70, dimana 30% merupakan tenaga dengan kualifikasi teknis dan 70% dengan kualifikasi umum. Komposisi diharapkan adalah 70% tenaga teknis dan 30% adalah tenaga umum, sehingga diharapkan pada tingkat operasional teknis pelaksanaan penyediaan infrastruktur dapat terlaksana secara maksimal dan dengan kualitas hasil pelaksanaan yang optimal.

- c. Sarana dan prasarana berupa peralatan penunjang pemeliharaan jalan belum memadai, seperti halnya alat-alat berat dan alat-alat pengujian bahan material konstruksi.
- d. Ketersediaan Basis Data kondisi infrastruktur masih minim. Diperlukan basis data infrastruktur yang baik dan valid pada seluruh sektor layanan seperti data layanan air minum, layanan pengolahan dan penyediaan SPAL (Sistem Pengolahan Air Limbah), kondisi dan sebaran jaringan irigasi, data jaringan dan kondisi ruas jalan kabupaten dan desa, sebaran dan pemanfaatan tata ruang dan lain-lain sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target penyediaan infrastruktur di kabupaten Lombok Tengah.
- e. Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang, yang diakibatkan oleh keterbatasan jumlah personil yang menangani.
- f. Pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang pasca beroperasinya Kawasan KEK Mandalika dan pembangunan Jalan Bypass BIL-Mandalika.
- g. Alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur publik dan penataan ruang masih rendah, baik alokasi pembiayaan yang bersumber dari DAU maupun alokasi yang dapat dibiayai melalui DAK pada setiap tahunnya, berbanding tebal dengan jumlah usulan pembiayaan yang direncanakan.

Selain permasalahan dan hambatan, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yakni :

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
  - Penyediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap masih menjadi prioritas pertama masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur publik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya harapan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang berkondisi layak dan mantap, baik berupa jalan kabupaten maupun jalan desa.
  - Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata di setiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.
  - Tingginya biaya penyediaan infrastruktur jalan baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan jalan, dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya.
  - Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk,



mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun.

- Banyaknya ruas jalan desa yang ingin ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten, baik atas dasar usulan masyarakat langsung maupun penyampaian melalui lembaga Legislatif daerah.
  - Peraturan daerah tentang penataan ruang daerah yang masih minim dan belum sampai pada tingkat detail tata ruang daerah.
  - Belum optimalnya penindakan dan sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan dan pemanfaatan ruang.
- b. Peluang yang ada antara lain:
- Bertambahnya dukungan Kementerian/Lembaga yang menangani penyediaan infrastruktur publik daerah, terutama dalam upaya menunjang pengembangan kawasan KEK Mandalika dan meningkatkan kualitas daerah penunjang disekitar KEK Mandalika.
  - Minat dan kesadaran masarakat untuk mengetahui aturan pemanfaatan ruang semakin hari semakin meningkat.
- b. Masih terjalinya sinergi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat dalam rangka kerjasama dan penyediaan infrastruktur publik, baik berupa dukungan program/kegiatan maupun dukungan anggaran.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022, ditampilkan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas, berikut ini:



Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PUPR

No table of figures entries found.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023 / n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota	Nilai SAKIP SKPD	BB	B	BB	B		BB	B	B
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	4	4	100	4	2	50
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	4	4	2	2	100	2	1	50
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya laporan Keuangan SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	230	230	230	230	100	230	230	100
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	12	12	100	1	0	0



	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	18	20	22	110	5	8	160
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan administrasi SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	26	5	5	100	1	1	100
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	31	12	16	16	100	6	5	83
	Kegiatan : Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	12	100	12	6	50
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor			2	2	100	1	6	600
	Kegiatan : Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perentase Terpeliharannya Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100



Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60	35	29	20	69	12	6	50
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	19	19	11	11	100	29	0	0
Program : Pengelolaan SDA	Prosentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi (%)	89.56	65.11	81.81	81.81	100	84.92	70	82
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	1.7	1.7	8	8	100	84.92	70	82
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung	6	4			#DIV/0!	4	0	0
Sub Kegiatan2: Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	10	8	46	55	120	0		#DIV/0!
Sub Kegiatan 3 : Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	16	8	53	32	60	1	679.77	67977



Sub kegiatan 4 : 'Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	12	20	30	150	12	6	50
Sub kegiatan 1: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	7	10.02			#DIV/0!	5	0.342	6.84
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman (%)	86.556	78.64	81.92	83.67	102	100		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Terlayani dan Mengonsumsi Air bersih (KK)	1930	745099	1967	6151	313	2200		0
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)	1	3			#DIV/0!	1		0
Sub Kegiatan : Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM (Dokumen)	7	3			#DIV/0!	0		#DIV/0!
Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (SR)	9475	0	10800	9543	88	2012		0
Sub Kegiatan : Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM jaringan perpipaan yang dioptimalisasi	1	0	1	0	0	0		#DIV/0!



Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi (Kelompok)	5	0			#DIV/0!	0		#DIV/0!
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Masyarakat terlayannya air bersih	1500	358	2254	2430	108	2200		0
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi layak dan aman (%)	100	0	0	0	#DIV/0!	100	50	50
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Dokumen)	1	0	1	0	0	200	68	34
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	1	0	0			#DIV/0!
Sub. Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota (KK)	150	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman (KK)	150	0	0	0	#DIV/0!	900		0



Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja (Unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
Sub. Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (KK)	150	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
Sub. Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas IPLT Terbangun (Unit)	3	0	200	200	100	200	68	34
Program : Penataan Bangunan Gedung	Gedung Pemerintah Terbangun (Unit)	0	0	3	4	133	3		0
Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi Teknik Gedung, ruang dan layak fungsi bangunan gedung yang diterbitkan (Dokumen)	175	0	150	160	107	2		0
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	0			#DIV/0!	2		0
Sub kegiatan: Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah sesuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui (Unit)	3	1	2	9	450	0		#DIV/0!



	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata (m2)	0	0	15000	5600	37	0		#DIV/0!
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luasan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan (m2)	0	0	15000	5600	37			
	Sub kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan asan Strategis Lainnya (Kawasan)	2	0	1	0	0	0		
	Program : Penyelenggaraan Jalan	Presentase jalan mantap (%)	99.99	65.42	79.88	72.38	91	86.58	11	13
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan mantap Kabupaten (Km)	809.8990 02	200.63	647.01	586.26	91	701.58	100	14.253542 01
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	4	0	2	2	100	1		0
	Sub Kegiatan : Survey kondisi jalan/jembatan				2	2	100	0		#DIV/0!



	Sub Kegiatan : Pelebaran Menuju Jalan Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (Km)	6.7	0			#DIV/0!	0		#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Km)	135	12.57	29.89	28.32	95	29.89	11.09	37.102709 94
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	5	0			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Km)	13.11	0.16			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)	490.361	188.06	218	218	100	85	30	35
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (M)	15	0	0	0	#DIV/0!	16.4	2.1	13
	Sub Kegiatan : Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (M)	1	0	65	44.5	68	0		#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran (M)	15	0	1	0	0	0		#DIV/0!



	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	4	0	2	0	0	0		#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan (M) Secara Rutin	15	0	15	0	0	0		#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan (M) Secara Berkala	2	0	1	0	0	0		#DIV/0!
	Sub Kegiatan : Penganggulan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi / Terekonstruksi Akibat Bencana (M)	0.25	0	2	0	0	0		#DIV/0!
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat. (%)	0.0035	0	0	0	#DIV/0!	0		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat. (%)	0.0035	0	0	0	#DIV/0!			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Dokumen)	1	0	1	0	0	0		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (Dokumen)	1	0	1	0	0	0		



	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan (Dokumen)	2	2	2	1	50	0		
	Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dan Perbup tata ruang (Dokumen)	2	2	2	1	50	1		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	3	2	1	50	1		
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (Dokumen)	1	0	10	0	0	0		
	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen produk tata ruang (Dokumen)	1	2	1	2	200	1		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	1	0	0	1		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	3	2	3	150	0		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dokumen)	1	0	10	0	0	0		



Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Kegiatan)	750	402	1	1	100	1		
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	800				#DIV/0!	1		
Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	20	0	1	0	0	0		
Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Kegiatan)	5	0	3	3	100			
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang (Dokumen) Penataan Ruang	5	0	5	0	0	0		
Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	1	0	1	0	0	0		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	0	1	0	0	100		





Dari Tabel 2.1 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

#### Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat 2 Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

- Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:
  - (a.) Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan.
  - (b.) Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya dilakukan pada panjang jalan 29,89 km. Itu artinya 30,85 km yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Rekonstruksi Jalan yang menyebabkan tidak mencapai target kinerja sebesar 79,88%
- Status akhir RTRW Propinsi masih pada status Rapat Lintas Sektorial Kementerian pada bulan Desember, sehingga RTRW Kabupaten tidak bisa berproses sebelum RTRW Propinsi ditetapkan. Karenanya, pelaksanaan proses legalisasi Ranperda RTRW tidak bisa dilaksanakan, sehingga target pencapaian kinerja berupa jumlah Perda sebanyak 2 Perda tidak bisa tercapai.

Adapun pelampauan pencapaian yang melebihi dari target ini disebabkan oleh :

- Kembali diluncurkannya Alokasi DAK Transdes (Transportasi Pedesaan) untuk kegiatan Penataan Desa berupa Fasilitasi Saran dan Prasarana Desa pada APBD-Perubahan 2021 kabupaten Lombok Tengah, dan kegiatan ini mampu dimanfaatkan dan dilaksanakan secara optimal, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan output panjang jalan yang terbangun melebihi target yang telah direncanakan.
- Alokasi yang cukup besar yang diperuntukan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan pekerjaan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan berupa pembangunan Sumur Bor yang bersumber dari DAU kabupaten Lombok Tengah, baik pada anggaran reguler maupun pada anggaran perubahan tahun 2021



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum terutama dalam hal penyediaan dan pengelolaan infrastruktur publik yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah telah banyak dilakukan ditahun 2023 lalu.

Berikut dijabarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah untuk tahun pelaksanaan 2023 yang tersaji pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah - Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
		2021 (Baseline)	2022	2023		2022	2023
Indeks Infrastruktur Wilayah	%	56	58	61	-	-	
Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	point				-	-	
Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	66.47	73.17	79.88	65	72.94	72.38
Persentase jumlah jembatan kondisi baik <sup>1</sup>	%	20.89	21.58	21.92	2	3	60.92
Indeks Kinerja Irigasi	%	51.4	54	56.9	-	-	63.92
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	60	62	64	-	-	83,82
Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	78.83	80.37	81.92	87,8	-	83,67
Cakupan Pelayanan SPALDS	%	-	-	0.55	3 juta	-	1,94
Cakupan Pelayanan SPALDT	%	-	-	0.55	6,5 juta	-	1,94
Prosentase penyusunan materi teknis RTR	%	11	22	33	-	-	33
Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	11	22	33	-	-	22
Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	16	33	50	-	-	77,78
Persentase KKPR yang dinilai	%	16	33	50	-	-	41,34
Persentase Pengaduan yang ditangani	%	9	27	45	-	-	0

1

2

3



Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah - Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Realisasi Kinerja Persentase Jalan Mantap dengan Target Tahunan

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jalan dalam kondisi mantap	79,88	72,38	Tidak Mencapai
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	21,92	60,92	Mencapai (Melampaui)

Berdasarkan Tabel 2.2-Tabel 2.3, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38% dengan target 79.88%. Sehingga kondisinya Tidak Mencapai, dengan gap 7.50 %. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, realisasi sebesar 60,92% dari target 21,92%. Maka kondisinya Mencapai (melampaui).

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38%. Ini artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,92% dan pada Tahun 2022 belum terhitung realisasinya.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap, dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu:
  - a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam Status Mantap yang telah mencapai 72,38 %
  - b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 %



2. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:
  - a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara berkala dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan.
  - b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya dilakukan pada panjang jalan 29,89 km. Itu artinya 30,85 km yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Rekonstruksi Jalan yang menyebabkan tidak mencapai target kinerja sebesar 79,88%
3. Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam pencapaian Indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar hanya 28% ( Rp 63.878.134.260,00) dari skala 100% (Rp 226.031.718.970,00). Hal ini berkorekuensi pada penurunan target pada DPA 2023 sebesar 29.89 km terhadap Renja 2023 sebesar 38.89 km. Penurunan target akan berkorekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan pada IKU.
4. Postur DPA Tahun 2023 terhadap postur DPA Tahun 2022 pada Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota adalah hanya sebesar 22% (Rp 63.878.134.260,00) terhadap postur pada progam yang sama (Rp 296.197.355.115,00). Hal ini berkorekuensi terhadap tidak terjadi peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Perbandingan postur DPA Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel berikut.
5. Faktor teknis. Diantaranya: Pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar pekerjaan jalan lainnya, padahal seharusnya ruas jalan tersebut harus ditangani secara khusus.
6. Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata disetiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah
7. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu



pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.

8. Keterbatasan terhadap data inventarisasi panjang jembatan secara total keseluruhan

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus
2. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.
3. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap
4. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata
6. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.

*Tabel 2. 4 Realisasi Kinerja Persentase sarana dan prasarana publik dan*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
		2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran	%	60	62	64		-	-	83,82



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
		2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
dalam kondisi baik								

Berdasarkan Tabel 2.2-Tabel 2.3, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah 83,82% dengan target 64%. Sehingga kondisinya Mencapai (melampaui).

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah 83,82%, dan realisasi di Tahun 2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 23,82 % dari baseline pada Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 70%, maka ini sudah melampaui. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa indikator ini perlu direview kembali terkait kriteria yang ditinjau sesuai regulasi termasuk dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan target capaiannya.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik, tidak terdapat target Indikator yang semisal di RPJMN.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:



1. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.
2. Dukungan Ketersediaan DED kegiatan Bangunan Gedung yang telah dilengkapi dalam periode Pra Perencanaan;
3. Ketepatan antara penjadwalan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk Program Bangunan Gedung;
4. Ketepatan perekrutan Tenaga Ahli pendukung yang telah memulai kontrak pekerjaannya di awal tahun pada periode Pra Perencanaan dalam mengakselerasi pengerjaan Kegiatan Bangunan Gedung;
5. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya;
6. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek; dan
7. Penggunaan metode manajemen proyek yang efisien untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi program penyusunan Sistem Informasi Database Gedung melalui Program Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus;
3. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan;
4. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata;



Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.

Tabel 2. 5 Realisasi Kinerja Indeks Kinerja Irigasi Tahun 2023

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Indeks Kinerja Irigasi	56,9	63,92	Mencapai (Melampaui)	112,34	Baik Sekali	64,26	-0,34 (Menurun)

Berdasarkan Tabel 2.2-Tabel 2.5, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 adalah 63,92% dengan target 56,9%. Sehingga kondisinya Mencapai (Melampaui).

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 adalah 63,92% dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38 dan realisasi di Tahun 2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 12.5 % dari baseline pada Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 62,8%, maka ini sudah melampaui. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa indikator ini perlu direview kembali terkait kriteria yang ditinjau sesuai regulasi termasuk dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan target capaiannya.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Indeks Kinerja Irigasi, tidak terdapat target Indikator yang semisal di RPJMN.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**



Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Keberadaan Program Pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur irigasi untuk memastikan kinerja optimal dalam mengalirkan air ke lahan pertanian, dengan memprogramkan secara rutin Kegiatan OP jaringan Irigasi. Walaupun kondisi ini kontradiksi dengan Kondisi jaringan irigasi yang terjadi penurunan fungsi layanan karena banyaknya kerusakan atau umur layanan sudah tua, disamping itu juga jaringan irigasi rusak di jaringan sekunder sekitar 35% (LKj-IP Tahun 2022);
2. Penggunaan teknologi informasi berupa pengaduan layanan irigasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pengiriman air ke lahan pertanian;
3. Pemberdayaan dan pengoptimalan Komisi Irigasi terkait pengelolaan infrastruktur irigasi;
4. Pengoptimalan penggunaan kinerja saluran irigasi dan ketersediaan air melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah No 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam I, II dan III Tahun 2019/2020.

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.
2. Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD
3. Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani secara bertahap.
4. Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3
5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.

Tabel 2. 6 Realisasi Kinerja Persentase Penduduk yang dilayani dengan akses

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Targe t	Realisas i	Capaian	Kinerj a	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkata n
Persentase	81,92	83,67	<b>Mencapai</b>	102,14	Baik	80,77	2,9



Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum			(Melampaui)		Sekali		

Berdasarkan Tabel 2.2-Tabel 2.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 adalah 83.67% dengan target 81.92%. Sehingga kondisinya Mencapai dan bahkan Melampaui walaupun dengan selisih yang tidak terlalu besar, sebesar 1,75%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 adalah 83.67% dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 80.77%. Hal ini berarti terdapat peningkatan Tahun 2022-2023 sebesar 2.9%.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 4.84 % dari baseline pada Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 86.56%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 2.89%. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data terkait jumlah penduduk tiap tahunnya dan KK yang belum terakses air minum.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum bila dibandingkan dengan Indikator Nasional melalui RPJMN, ditetapkan target sebesar 87.8%. Target nasional ini memiliki selisih pencapaian terhadap realisasi Tahun 2023 sebesar 4.13%, dan perbandingan antara Target Akhir Renstra dengan Target Nasional memiliki selisih 1.24%, dengan target nasional yang lebih tinggi.



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Program yang berkaitan dalam kinerja untuk meningkatkan akses terhadap pasokan air minum merupakan program dengan posisi yang strategis karena merupakan pencapaian dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (*Permendagri*) Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan *Standar Pelayanan Minimal dan Strategi Nasional* (Stranas) percepatan penurunan stunting.
2. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya.
3. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek
4. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra DPUPR Tahun 2021 – 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di Tahun 2023.
5. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum
6. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM
7. Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
2. Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan di 2025
3. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan.
4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 4.



5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.

Tabel 2. 7 Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan SPALDS dan

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)					Realisasi Tahun 2022 (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori	Realisasi (2022)	Peningkatan
Cakupan Pelayanan SPALDS	0.05	1,94	Melampaui	3880	Baik Sekali	-	-
Cakupan Pelayanan SPALDT	0.05	1,94	Melampaui	3880	Baik Sekali	-	-

Berdasarkan Tabel 2.2-Tabel 2.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 adalah 1.94% dengan target 0.55%. Sehingga kondisinya Mencapai dan bahkan Melampaui dengan selisih sebesar 1.39%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 adalah 1.94% dan realisasi di Tahun 2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalui LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2022 adalah mengalami peningkatan 1.39 %. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 7.31%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 5.37%. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data terkait jumlah penduduk tiap tahunnya dan KK yang belum terakases cakupan pelayanan SPALDS dan SPALDT.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;**

Untuk indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT



bila dibandingkan dengan Indikator Nasional melalui RPJMN, ditetapkan target sebesar 3 juta. Sehingga terdapat perbedaan dalam satuan indikatornya, yaitu target daerah menggunakan persentase, dan target nasional menggunakan jumlah penduduk. Sehingga tidak bisa dibandingkan karena berbeda satuan.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Ketersediaan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang memuat dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dengan tujuan agar pembangunan sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lombok Tengah memuat data-data lokasi yang belum terlayani air limbah yang telah dipadukan dengan data P3KE dan desil penanganan stunting. Sehingga diharapkan akan muncul lokus prioritas sekaligus kebutuhan penganggarannya.
3. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses pengadaannya; dan
4. Implementasi secara optimal aplikasi *e-catalogue* teknologi atau sistem informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pemantauan proyek.

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
2. Menginternalisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ke Renstra DPUPR berupa Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
3. Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana
4. Memutuskan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan program
5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja Sasaran 5



6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5

### **2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang tentunya dapat mempengaruhi pencapaian maupun upaya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

1. Sumber daya manusia berupa tenaga Teknis yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah masih minim, secara rasio komposisi tenaga teknis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lombok Tengah yakni 30:70, dimana 30% merupakan tenaga dengan kualifikasi teknis dan 70% dengan kualifikasi umum. Komposisi diharapkan adalah 70% tenaga teknis dan 30% adalah tenaga umum, sehingga diharapkan pada tingkat operasional teknis pelaksanaan penyediaan infrastruktur dapat terlaksana secara maksimal dan dengan kualitas hasil pelaksanaan yang optimal.
2. Sarana dan prasarana berupa peralatan penunjang pemeliharaan jalan belum memadai, seperti halnya alat-alat berat dan alat-alat pengujian bahan material konstruksi.
3. Ketersediaan Basis Data kondisi infrastruktur masih minim. Diperlukan basis data infrastruktur yang baik dan valid pada seluruh sektor layanan seperti data layanan air minum, layanan pengolahan dan penyediaan SPAL (Sistem Pengolahan Air Limbah), kondisi dan sebaran jaringan irigasi, data jaringan dan kondisi ruas jalan kabupaten dan desa, sebaran dan pemanfaatan tata ruang dan lain-lain sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target penyediaan infrastruktur dikabupaten Lombok Tengah.
4. Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang, yang diakibatkan oleh keterbatasan jumlah personil yang menangani.
5. Pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang pasca beroperasinya Kawasan KEK Mandalika dan pembangunan Jalan Bypass BIL-Mandalika.
6. Alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur publik dan penataan ruang masih rendah, baik alokasi pembiayaan yang bersumber dari DAU maupun alokasi yang dapat dibiayai melalui DAK pada setiap tahunnya, berbanding tebalik dengan jumlah usulan pembiayaan yang direncanakan.

Selain permasalahan dan hambatan, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yakni :

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:



- Penyediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap masih menjadi prioritas pertama masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur publik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya harapan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang berkondisi layak dan mantap, baik berupa jalan kabupaten maupun jalan desa.
- Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata di setiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.
- Tingginya biaya penyediaan infrastruktur jalan baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan jalan, dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya.
- Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun.
- Banyaknya ruas jalan desa yang ingin ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten, baik atas dasar usulan masyarakat langsung maupun penyampaian melalui lembaga Legislatif daerah.
- Peraturan daerah tentang penataan ruang daerah yang masih minim dan belum sampai pada tingkat detail tata ruang daerah.
- Belum optimalnya penindakan dan sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan dan pemanfaatan ruang.

b. Peluang yang ada antara lain:

- Bertambahnya dukungan Kementrian/Lembaga yang menangani penyediaan infrastruktur publik daerah, terutama dalam upaya menunjang pengembangan kawasan KEK Mandalika dan meningkatkan kualitas daerah penunjang disekitar KEK Mandalika.
- Minat dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui aturan pemanfaatan ruang semakin hari semakin meningkat.
- Masih terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat dalam rangka kerjasama dan penyediaan infrastruktur publik, baik berupa dukungan program/kegiatan maupun dukungan anggaran.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara



program pembangunan dari Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah :



Tabel 2. 8 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			144,668,790,185		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			170,167,882,500		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			143,845,914,207		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			170,167,882,500		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			143,845,914,207		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			170,167,882,500		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18,961,101,165		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	27,920,000,000		



	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	59,027,970		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	80,000,000		
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	27,762,950	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	50,000,000		
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	31,265,020	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	30,000,000		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	16,589,592,581		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19,335,000,000		



1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2316 Orang/bulan	16,183,005,156	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	230 Orang/bulan	18,750,000,000		
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	386,035,985	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	12 Laporan	550,000,000		
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5 Laporan	20,551,440	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	20 Laporan	35,000,000		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	228,907,304		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	410,000,000		



1.03.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	49,107,304	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	185,000,000		
1.03.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	14 Laporan	179,800,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	16 Laporan	225,000,000		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	273,132,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	600,000,000		
1.03.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	273,132,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	600,000,000		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		1,614,695,040		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1,545,000,000		



1.03.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1,582,151,040	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1,500,000,000		
1.03.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	32,544,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	45,000,000		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		195,746,270		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5,950,000,000		
1.03.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	64 Unit	195,746,270	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	64 Unit	450,000,000		
1.03.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	5,500,000,000		



2.	1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<i>Persentase irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik</i>	86.95 %	13,764,596,030		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<i>Persentase irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik</i>	86.95 %	17,040,000,000		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik</i>	1,7 ltr/dtk/Ha	4,337,561,030		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik</i>	1,7 ltr/dtk/Ha	6,540,000,000		
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi</i>	20 Lembaga	157,996,530	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi</i>	20 Lembaga	165,000,000		
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	23 Unit	4,161,384,900	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	36 Unit	5,500,000,000		
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun</i>	6 Dokumen	18,179,600	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun</i>	6 Dokumen	875,000,000		



	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Irigasi Primer dan skunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	15 DI	9,427,035,000		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Irigasi Primer dan skunder pada DI yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	10,500,000,000		
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	9 KM	9,427,035,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	6 km	10,500,000,000		
3.	1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b><i>Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman</i></b>	85.01 %	13,322,343,840		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b><i>Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman</i></b>	-	75,150,000,000		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah masyarakat (SR) terlayani dan mengkonsumsi Air Bersih</i>	1987 SR	13,322,343,840		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah masyarakat (SR) terlayani dan mengkonsumsi Air Bersih</i>	-	74,125,900,000		
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i>	165 Unit	26,321,040	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i>	165 Unit	35,000,000,000		



	1.03.03.2.01.00 25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>	6 Dokumen	22,769,400	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>	6 Dokumen	525,000,000		
	1.03.03.2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	1,7 Liter/De tik	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	10800 SR	24,850,900,000		
	1.03.03.2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	1080 SR	13,273,253,400	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	1080 SR	13,750,000,000		Sesuai kebutuhan
4.	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<i>Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aman</i>	100 %	10,036,809,400		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<i>Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aman</i>	100 %	12,250,000,000		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengelolaan air limbah domesti</i>	2 Unit	10,036,809,400		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengelolaan air limbah domesti</i>	2 Unit	12,250,000,000		Sesuai kebutuhan



							Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	1,500,000,000	Montong Ajan, Prai Meke, Pengejek, Bilebante, Taman Indah, Sisik, Serage, Segale Anyar, Semparu, Panjisari, Renteng, Praya, Prapen, Tiwugalih, Gerantung, Sasake, Dakung, Labulia, Sukarara, Bunkate, Bagu, Sintung, Pringgarata, Murbaya, Masmas	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>	100 M <sup>3</sup> /Hari	10,036,809,400	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>	100 M <sup>3</sup> /Hari	10,750,000,000	Montong Ajan, Prai Meke, Pengejek, Bilebante, Taman Indah, Sisik, Serage, Segale Anyar, Semparu, Panjisari, Renteng, Praya, Prapen, Tiwugalih, Gerantung, Sasake, Dakung, Labulia, Sukarara, Bunkate, Bagu, Sintung, Pringgarata, Murbaya, Masmas	Sesuai kebutuhan	



5.	1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	-	-	424,270,086		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	-	-	400,000,000		
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	424,270,086		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	400,000,000		
	1.03.07.2.01.0005	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	<i>Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan</i>	8 M <sup>3</sup> /Hari	424,270,086	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	<i>Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan</i>		400,000,000		Sesuai kebutuhan
6.	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	-	-	7,358,773,560		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	-	-	14,000,000,000		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	7,358,773,560		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	14,000,000,000		
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>	2 Bangunan Gedung	7,358,773,560	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>	2 Bangunan Gedung	8,000,000,000		Sesuai kebutuhan



	1.03.08.2.01.00 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	6,000,000,000		Meningkatkan jumlah gedung permanen
7.	<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	-	-	0		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	-	-	<b>1,500,000,000</b>	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1,500,000,000	
	1.03.09.2.01.00 10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	1,500,000,000		
8.	<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	-	-	<b>79,145,548,520</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	-	-	<b>91,957,882,500</b>	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	79,145,548,520		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	91,957,882,500	



1.03.10.2.01.00 29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	4 Dokumen	18,479,600	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	6 Dokumen	698,500,000		Terham proses penyus DED jala berdam pengaju dana ke
1.03.10.2.01.00 31	Penggantian Jembatan	<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>	800 Jembatan	3,217,938,920	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penggantian Jembatan	<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>		300,000,000		Sesuai kebutuh
1.03.10.2.01.00 33	Rekonstruksi Jalan	<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	9,7 KM	74,663,900,400	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rekonstruksi Jalan	<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	9.73 KM	67,920,000,000	Olor Agung - Enjak ,Beson - Kerembong ,Pendem - Kijang - Stute ,Mujur - Peras ,Kateng - Jangkijh Jawe ,Selangit - Kumbak (Batas Lobar)	Sesuai kebutuh
1.03.10.2.01.00 34	Pemeliharaan Berkala Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	7,5 KM	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Berkala Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	20.5 KM	13,635,000,000	Pemepek - Persil, Teratak - Benang Stokel, Ganti - Semoyang, Kalisade - Bunut Baik, Ganti - Janapria, Mujur - Langko, Jembe - Langko, Rembitan - Kedaron,,	Berpote mengun capaian persent mantap tidak ad pemelih yang dil



	1.03.10.2.01.00 43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	10 KM	35,229,600	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	2 Dokumen	300,000,000		
	1.03.10.2.01.00 46	Pemeliharaan Rutin Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	526,75 KM	1,210,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Rutin Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	526,75 KM	9,104,382,500		
9.	<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	-	-	<b>74,199,220</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	-	-	<b>3,050,000,000</b>		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	0		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	2,850,000,000		
	1.03.11.2.01.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>	60 Orang	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>		2,500,000,000		



	1.03.11.2.01.00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>	100 Orang	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>		350,000,000		
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	74,199,220		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200,000,000		
	1.03.11.2.02.00 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	1 Dokumen	74,199,220	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>		200,000,000		
10	<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	-	-	<b>758,272,386</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	-	-	<b>2,050,000,000</b>		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	471,944,050		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	850,000,000		- Adan potensi tercapa peneta RTRW, salah sa mekanis terkend pelaksa



1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	471,944,050	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	600,000,000		
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	10 Laporan	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	10 Laporan	250,000,000		- Berkuwasaya masyarakat tentang - Tidak optimal pelaksana KKPR
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen RDTR yang ditetapkan</i>	-	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>- Jumlah Dokumen RDTR yang ditetapkan</i>	-	800,000,000		- Terjadi proses pengemwilayah berdam investas pemanf ruang
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	450,000,000		
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	<i>Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	<i>Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	350,000,000		



	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	150,305,760		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	400,000,000		
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>	1 Sistem Informasi	150,305,760	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>	1 Sistem Informasi	400,000,000		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	136,022,576		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0		
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>	5 Dokumen	136,022,576	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>	5 Dokumen	0		
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>			<b>822,875,978</b>		<b>NON URUSAN</b>			<b>1,800,000,000</b>		
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>822,875,978</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>1,800,000,000</b>		
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	<b>BB Predikat</b>	<b>822,875,978</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	-	<b>1,800,000,000</b>		



	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		822,875,978		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1,800,000,000		
	X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	29 Unit	822,875,978	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>		1,800,000,000		
<b>J U M L A H</b>					<b>144,668,790,185</b>					<b>170,167,882,500</b>		



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia dan pengelola infrastruktur publik, Dinas PUPR dalam menetapkan program dan kegiatan tentunya juga mengacu kebutuhan masyarakat. Usulan dan keinginan masyarakat telah disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan yakni melalui Musrenbang, baik Murenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang Tingkat Kabupaten (Forum SKPD).

Dalam Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023, yang diikuti oleh seluruh kecamatan lingkup kabupaten Lombok Tengah atau sejumlah 12 kecamatan telah dirangkum seluruh usulan yang berkenaan dengan penyediaan infrastruktur dasar publik. Usulan-usulan masyarakat ini tentunya tidak dapat seluruhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, karna keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Namun Dinas PUPR akan tetap berusaha memenuhinya melalui kerjasama dan pengusulan dukungan pembiayaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat.

*Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah*

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehab Jaringan Irigasi Benjor	Dasan Lekong, Kab. Lombok Tengah	Batukliang
2	Sambungan rumah (SR) Air Minum	Masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan aliran air bersih atau air minum	Desa Karang Sidemen, Kab. Lombok Tengah	Batukliang Utara
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Sering Terjadi Luapan Air Karena Saluran Irigasi Tidak ada Pemeliharaan	Dusun Dasan Lendang, Kab. Lombok Tengah	Janapria
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	tidak lancarnya aliran air untuk pertanian pada masyarakat desa prako	Dusun Prako, Dusun pemantek dan dusun tarekat-sayang, Kab. Lombok Tengah	Janapria
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	tidak lancarnya aliran untuk irigasi lahan pertanian masyarakat	Dusun Prako, Dusun Tarekat sayang dan Dusun Pemantek , Kab. Lombok Tengah	Janapria



6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	kehilangan air pada saluran irigasi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti rembesan, bocoran, evaporasi, bahkan eksploitasi	Desa Lingkok Berenge, Kab. Lombok Tengah	Janapria
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	meningkatkan fungsi dari saluran irigasi, Sehingga air yang ada di saluran irigasi bisa menjangkau lahan pertanian lebih luas lag	Desa Lingkok Berenge, Kab. Lombok Tengah	Janapria
8	Lapen Jalan Desa LAPEN 5 CM + LPB Klas C (Full)	akses jalan merupakan penunjang kelancaran ekonomi masyarakat dengan keadaan yang kurang baik maka dapat disimpulkan bahwa perjalanan ekonomi masyarakat kurang bergerak, untuk itu pemerintah merealisasikan jalan tersebut.	runggang-sisik dan liwung, Kab. Lombok Tengah	Janapria
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	tidak cukupnya debit air untuk pertanian	Desa Pendem, Kab. Lombok Tengah	Janapria
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Saluran Irigasi Rusak (Rehab irigasi sekunder dan tersier)	Jalan Keruak Salik Jembe, Kab. Lombok Tengah	Janapria
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Banyaknya saluran sekunder yang rusak	Desa Perina, Kab. Lombok Tengah	Jonggat
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Berapa dusun ketika hujan mengalami genangan banjir akibat sistem drainase yang kurang baik, sehingga memerlukan kegiatan pembangunan drainase	Desa Sukarara, Kab. Lombok Tengah	Jonggat
13	Sambungan rumah (SR) Air Minum	-	Aik Bual, Kab. Lombok Tengah	Kopang
14	Sambungan rumah (SR) Air Minum	-	Berinding, Kab. Lombok Tengah	Kopang



15	Sumur Bor (dan acc.) Spesifikasi : D=Ø5" ,kedalaman ≤ 70 m	DEBET AIR KURANG	LINGKUNGAN EMBUNG BENGKEL RT 02 KEL. LENENG, KEC PRAYA, Kab. Lombok Tengah	Praya
16	Sambungan rumah (SR) Air Minum	Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan Sambungan Rumah (SR) Air Minum	Desa Jago, Kab. Lombok Tengah	Praya
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Banyak Jaringan Irigasi yang rusak	Desa Bunut Baik, Kab. Lombok Tengah	Praya
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	-	montong saph, Kab. Lombok Tengah	Praya Barat Daya
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	-	Ranggagata, Kab. Lombok Tengah	Praya Barat Daya
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	-	kabul, Kab. Lombok Tengah	Praya Barat Daya
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	-	ungga, Kab. Lombok Tengah	Praya Barat Daya
22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Saluran Irigasi Pertanian banyak yang rusak	kelurahan jontlak, Kab. Lombok Tengah	Praya Tengah
23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi banyak yang sudah rusak	Dusun Bir Ali Desa Pejanggik , Kab. Lombok Tengah	Praya Tengah
24	Sambungan rumah (SR) Air Minum	kekurangan Air bersih	Desa ganti, Kab. Lombok Tengah	Praya Timur
25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Debit Air Kurang, suplay air tingkat petani kurang, sering terjadi terlambat tanam bahkan gagal panen	Setambir-Kelanjuh, Kab. Lombok Tengah	Praya Timur
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	-	DUSUN SENGERANG I DESA SENGERANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Kab. Lombok Tengah	Praya Timur
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kondisi jaringan irigasi rusak	Desa Pemekaran Pegonak, Kab. Lombok Tengah	Praya Timur
28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Sulit terjangkaunya aliran air untuk pertanian di wilayah hilir	Pemepek, Kab. Lombok Tengah	Pringgarata



### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

##### **3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dengan Visi dan Misi Kementerian PUPR RI adalah : *"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"* dengan Misi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan



kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PUPR RI Tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR RI Tahun 2020-2024 yakni :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;



- (3) Kapasitas tampung per kapita;
  - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
  3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
    - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
    - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
  4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
    - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
    - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
  5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
    - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
    - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
    - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
    - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
    - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020- 2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA (Sumber Daya Air), meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. Keselarasan ini dapat terlihat dalam tabel 3.1 berikut.



Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran Renstra Kementerian PUPR RI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA.	Layanan air irigasi belum merata akibat kondisi jaringan irigasi yang masih dibawah standar.	Kondisi konstruksi jaringan irigasi kabupaten dibawah standar masih tinggi.	Kebutuhan masyarakat petani akan ketersediaan air yang mencukupi untuk layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
			Masih rendahnya alokasi anggaran peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.	
			Kurangnya jumlah embung, bendung atau tampungan air sebagai alternatif penyediaan air irigasi.	
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Masih tingginya jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap.	Penanganan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang rendah disetiap tahun.	Tingginya kebutuhan akan jalan kabupaten dengan kondisi mantap yang terkoneksi dengan jaringan jalan nasional.
			Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.	
			Alokasi utama penanganan jalan masih mengandalkan	



			anggaran DAK pemerintah pusat.	
			Semakin banyak ruas jalan desa dan jalan non status yang ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten.	
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Peningkatan kualitas SDM bidang konstruksi masih belum dilakukan secara optimal.	Belum tersedianya basis data SDM bidang konstruksi lingkup kabupaten. Rendahkannya jumlah pelatihan dan pembinaan SDM bidang konstruksi oleh yang diinisiasi pemerintah daerah.	Kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang semakin meningkat pada proyek konstruksi skala lokal dan regional.

### 3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi NTB.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2024 yaitu : **“Terwujudnya RUANG Hunian yang Ideal dilengkapi Jalan mantap, Air lestari dan Utilitas umum (RUANG HIJAU) melalui Gerakan Membangun Infrastruktur yang Cemerlang (GEMILANG) “** dengan 8 misi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keseimbangan aksesibilitas dan konektifitas infrastruktur antar kawasan secara terpadu dalam pengembangan wilayah;
4. Meningkatkan kehandalan layanan sumber daya air;
5. Meningkatkan kemantapan jalan guna mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis;



6. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi serta kualitas penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan daya saing jasa konstruksi yang unggul dan kompetitif;
8. Meningkatkan profesionalisme dan independensi pengendalian mutu material konstruksi.

Tujuan ingin dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi NTB berdasarkan Misi yang ada didalam RPJMD 2018 – 2023 (masuk dalam Misi I, Misi IV, dan Misi V) dapat dipilah menjadi 4 yaitu :

1. Pulihnya infrastruktur yg rusak akibat bencana gempa bumi;
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar;
3. Meningkatnya kualitas dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin.

Dari 4 tujuan tersebut secara lebih rinci terbagi menjadi 10 Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi NTB yaitu :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan gedung perkantoran/ publik pasca bencana gempa bumi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap;
4. Meningkatnya ketersediaan air irigasi, dan mengurangi resiko bencana;
5. Meningkatnya profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur;
6. Meningkatnya industri konstruksi yang kompetitif;
7. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan infrastruktur ke PU-an;
8. Meningkatnya sarana prasarana umum pada kawasan strategis;
9. Melaksanakan percepatan penataan ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
10. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas PUPR Provinsi NTB terdapat beberapa point yang selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, yakni persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap, meningkatnya ketersediaan air irigasi serta mengurangi resiko daya



rusak air dan meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

*Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB.*

NO	Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Masih tingginya jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap, yang mendukung akses terhadap jalan provinsi.	<p>Penanganan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang rendah disetiap tahun.</p> <p>Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.</p> <p>Alokasi utama penanganan jalan masih mengandalkan anggaran DAK pemerintah pusat.</p> <p>Semakin banyak ruas jalan desa dan jalan non status yang ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten.</p>	Tingginya kebutuhan akan jalan kabupaten dengan kondisi mantap yang terkoneksi dengan jaringan jalan provinsi.
2	Meningkatnya ketersediaan air irigasi serta	Layanan air irigasi belum merata akibat kondisi	Kondisi konstruksi jaringan irigasi kabupaten	Kebutuhan masyarakat petani akan



	mengurangi resiko daya rusak air.	jaringan irigasi yang masih dibawah standar.	dibawah standar masih tinggi. Masih rendahnya alokasi anggaran peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kurangnya jumlah embung, bendung atau tampungan air sebagai alternatif penyediaan air irigasi.	ketersediaan air yang mencukupi untuk layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah	Belum meratanya sebaran layanan air minum lingkup kabupaten.	Jarak dan sebaran pemukiman penduduk yang berjauhan antara permukiman satu dengan permukiman lain. Terbatasnya sumber mata air. Kondisi tofografi permukiman. Tingginya biaya dan rendahnya alokasi anggaran penyediaan sarana pendistribusian air minum.	Kebutuhan akan ketersediaan air minum yang tinggi.
		Belum meratanya penyediaan pengelolaan air limbah.	Rendahnya kemampuan individu dalam penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah rumah tangga/domestik.	Semakin tingginya kesadaran dan minat masyarakat akan pengelolaan air limbah rumah tangga/domestik.



		<p>Terbatasnya lahan dalam rangka penyediaan pengolahan limbah rumah tangga/domestik.</p> <p>Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik.</p>	
--	--	--	--

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.**

#### **3.2.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.**

Tujuan yang dimaksud adalah merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati Lombok Tengah serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan target pencapaian dalam kurun waktu 1 (Satu) hingga 5 (Lima) Tahun.

Tujuan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan permasalahan pokok bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang pekerjaan umum dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah, dimana Visi-nya adalah “Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya” dengan misi sebagai berikut:

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai SDM yang cerdas, mandiri, dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih;
4. Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas (merupakan misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah);
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.



Berdasarkan Visi-Misi Bupati Lombok Tengah, telaahan terhadap Visi-Misi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Visi-Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta dengan mencermati kondisi terkini dan isu-isu strategis yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka dirumuskanlah Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2021-2026 yaitu **“Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Publik yang merata dan berkelanjutan”** dengan indikator berupa Indeks konektivitas, Indeks kinerja sistem irigasi, Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik, Ketaatan terhadap RTRW, Cakupan Layanan Air Minum, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

### 3.2.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu khusus (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic), dan tepat waktu (time bound).

Adapun Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap;
2. Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani;
3. Tersedianya gedung pelayanan publik dan ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang;
4. Meningkatnya distribusi air minum;

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 202 beserta indikator sasarannya diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2023	2024	2025		2022	2023
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	61	66	70	-	-	
	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	point		62	81	-	-	
1   Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	79.88	79.88	86.58	93.29	65	72.94	72.38



Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Nasional (RPJMN)	Realisasi		
			2023	2024	2025		2022	2023	
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik <sup>4</sup>	21.92	21.92	24.81	25.57	- <sup>5</sup>	- <sup>6</sup>	60.92	
2	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	56.9	58.3	60.25	-	-	63.92	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	64	66	68	-	-	83,82
4	Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	81.92	83.46	85.01	87,8	-	83,67
5	Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	0.55	2.24	3.93	3 juta	-	1,94
		Cakupan Pelayanan SPALDT	%	0.55	2.24	3.93	6,5 juta	-	1,94
6	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	%	33	55	78	-	-	33
		Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	33	55	78	-	-	22
7	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	50	67	83	-	-	77,78
8	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang dinilai	%	50	67	83	-	-	41,34
		Persentase Pengaduan yang ditangani	%	45	64	82	-	-	0

### 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah di atas, maka diwujudkan kedalam 8 Program dengan 15 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan prioritas Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam Rencana Kerja Tahun 2025, pada tabel 3.4 berikut:

<sup>4</sup> Merupakan indikator kinerja perbaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (Persentase jumlah jembatan kondisi baik, Indeks Kinerja Irigasi, Tersedianya bangunan gedung yang andal, Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum, Cakupan Pelayanan SPALDS, Prosentase penyusunan materi teknis RTR, Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan, Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang, Persentase KKPR yang dinilai, Persentase Pengaduan yang ditangani)

<sup>5</sup> Target dan indikator di RPJMN dengan target dan indikator di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berbeda

<sup>6</sup> Disebabkan karena indikator dan targetnya disusun pada Tahun 2023 merupakan indikator kinerja perbaikan



Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota



1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.0005	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan



1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>
<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar



## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra Dinas PUPR 2021-2026, serta memperhatikan isu-isu strategis dan arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Pendanaan Tahun 2025 untuk Dinas Pekerjaan Umum



Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pagu Sesuai Kebutuhan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional				Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	03						314,173,018,970						350,533,350	
1	03	01					26,660,000,000						28,899,000,000	
1	03	01	2.01				80,000,000						104,000,000	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000			4. Integrasi Pelayanan Publik	4 Dokumen	69,000,000	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,000,000			4. Integrasi Pelayanan Publik	2 Laporan	35,000,000	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,335,000,000					19,445,000,000	



1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				230 Orang/bu	18,750,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Integrasi Pelayanan Publik 4. Integrasi Pelayanan Publik	230 Orang/bu	18,750,000,000
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	550,000,000					4. Integrasi Pelayanan Publik	12 Laporan	650,000,000
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				20 Laporan	35,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Integrasi Pelayanan Publik 4. Integrasi Pelayanan Publik	20 Laporan	45,000,000
1	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>3,500,000,000</b>							<b>4,575,000,000</b>
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	185,000,000					4. Integrasi Pelayanan Publik	6 Paket	225,000,000



1	031	0206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	225,000,000				4. Integrasi Pelayanan Publik		16 Laporan	250,000,
1	031	0208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,545,000,000</b>							<b>2,050,000,</b>
1	031	0208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,500,000,000				4. Integrasi Pelayanan Publik		12 Laporan	2,000,000,
1	031	0208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	45,000,000				4. Integrasi Pelayanan Publik		2 Laporan	50,000,
1	031	0209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>2,200,000,000</b>							<b>2,725,000,</b>
1	031	0209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	450,000,000				4. Integrasi Pelayanan Publik		64 Unit	475,000,
1	031	0209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				29 Unit	1,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Integrasi Pelayanan Publik 4. Integrasi Pelayanan Publik		29 Unit	2,250,000,



1	032				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Prosentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		86,95	<b>16,875,000,000</b>							<b>16,875,000,000</b>
1	032	2.01			<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ketersediaan debit air per/hektar		1,7 ltr/dtk/ha	<b>6,375,000,000</b>							<b>6,375,000,000</b>
1	032	2.01	01		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		6 Dokumen	875,000,000	Tersebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Dokumen		875,000,000
1	032	2.01	49		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		36 DI	5,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36		5,500,000,000
1	032	2.02			<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah irigasi primer dan skunder pada DI yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten</b>		6 km	<b>10,500,000,000</b>					6 km		<b>10,500,000,000</b>
1	032	2.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		6 km	10,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Km		10,500,000,000



1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman				85,01%	<b>43,876,800,000</b>					86,56 %	<b>50,258,550,</b>
1	03	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah masyarakat terlayani dan mengkonsumsi air Air Bersih				1950kk	<b>43,876,800,000</b>					1980kk	<b>50,258,550,</b>
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				6 Dokumen	525,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		6 Dokumen	6,750,
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				10800 SR	24,850,900,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Integrasi Pelayanan Publik	10800 SR	28,850,900,



1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				1080 SR	13,750,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			1080 SR	15,650,000,
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah masyarakat terlayani Air Bersih				750 KK	4,750,900,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Integrasi Pelayanan Publik		750 KK	5,750,900,
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase akses sanitasi layak dan aman				100%	<b>7,300,000,000</b>						100%	<b>9,400,000,</b>
1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Laporan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik				2 Laporan	<b>7,300,000,000</b>						2 Laporan	<b>9,400,000,</b>



1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			4 Dokumen	400,000,000
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				200 Rumah Tangga	1,500,000,000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			200 Rumah Tangga	2,000,000,000
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				200 Rumah Tangga	5,500,000,000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Integrasi Pelayanan Publik		200 Rumah Tangga	7,000,000,000
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						<b>7,000,000,000</b>							<b>8,500,000,000</b>





1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	1,500,000,000				4. Integrasi Pelayanan Publik		1 Kawasan	2,000,000,
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	prosentase jalan mantap				93,20%	<b>209,081,218,970</b>						99,99%	<b>232,575,800</b>
1	03	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Panjang jalan kabupaten mantap				755,83km	<b>209,081,218,970</b>						809,90	<b>232,575,800</b>
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				6 Dokumen	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			4 Dokumen	525,000,
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			2 Dokumen	300,000,



1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				38.89 KM	188,081,218,970	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Jalan dan Irigasi Kondisi Baik 1. Jalan dan Irigasi Kondisi Baik		38.89 KM	205,750,800
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				20.5 KM	20,250,000,000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			20.5 KM	26,000,000,
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat				0,35%	<b>330,000,000</b>					0,35%	<b>475,000,</b>
1	03	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat					<b>250,000,000</b>						<b>350,000,</b>
1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				1 Dokumen	250,000,000					1 Dokumen	350,000,
1	03	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>80,000,000</b>						<b>125,000,</b>



1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				2 Dokumen	80,000,000					2 Dokumen	125,000,
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Tersedianya regulasi tata ruang				2	<b>1,550,000,000</b>					2	<b>1,550,000,</b>
1	03	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah perda dan perbup tata ruang				2 Dokumen	<b>900,000,000</b>					2	<b>850,000,</b>
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	600,000,
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				2 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	250,000,
1	03	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen pemanfaatan ruang				1 Dokumen	<b>350,000,000</b>					700 kegiatan	<b>350,000,</b>
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				500 Dokumen	350,000,000					1 Dokumen	350,000,
1	03	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang				1 kegiatan	<b>300,000,000</b>					5 kegiatan	<b>350,000,</b>



1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				10 Dokumen	300,000,000					1 Dokumen	350,000,	
<b>TOTAL</b>											<b>314,173,018,970</b>							<b>350,533,350</b>



## BAB V PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan secara optimal, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya :

1. Dukungan dan kerjasama seluruh komponen pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan konsolidasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan DPRD menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dimana menyangkut kebijakan alokasi anggaran dan penyerapan keinginan serta aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil mereka. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik diharapkan program kegiatan yang direncanakan mendapatkan alokasi pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan.
3. Peran serta dan dukungan seluruh masyarakat maupun seluruh unsur serta kelompok-kelompok swadaya yang ada sangat diperlukan terutama pada tingkat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dilapangan, sehingga penyediaan infrastruktur tersebut dapat tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
4. Meningkatkan komunikasi dan jalinan kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat terutama dengan Kementerian Teknis terkait, dalam rangka sinergitas program kegiatan maupun dukungan pembiayaan yang pada akhirnya mampu menunjang pencapaian program pembangunan prioritas pemerintah kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Juli 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.**

NIP. 196712311992031117

